



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GIRI KOORNIAHARTA P.**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **260825**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.945.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m²/77 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m²/113 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m²/237 m² di KAB / KOTA KOTA CIREBON , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m²/50 m² di KAB / KOTA KOTA CIREBON , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 18.42 m²/18.42 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 21.52 m²/21.52 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.141.800.000**

1. MOBIL, HONDA HR-V JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 305.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.900.000



3. MOBIL, ALL NEW CR-V RS 2024 CR-V RS E-HEV 2024 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 814.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.033.341.900
D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.500.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.809.458.593
F. HARTA LAINNYA	Rp.	398.962.255
Sub Total	Rp.	13.828.562.748
III. HUTANG	Rp.	1.437.990.355
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.390.572.393

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.